

DPRD Paser Berikan 9 Rekomendasi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,23/04/2024

➤ Laporan LKPJ Bupati Tahun 2023

TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser tahun anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD Paser, Fadly Imawan Bupati Paser Fahmi Fadli yang diikuti unsur Forkopimda, jajaran Asisten, Kepala OPD, Camat dan tamu undangan, yang berlangsung di Ruang Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (22/4/2024).

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan ada beberapa catatan strategis, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

“Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan terhadap LKPJ Bupati Paser tahun 2023, total ada 9 rekomendasi yang kami sampaikan,” terang Hendra.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser, Basri Mansyur mengatakan penerimaan pajak daerah di tahun 2023 hanya mencapai 68,77 persen yang tergolong masih rendah.

“DPRD Paser menekankan agar pemerintah daerah melalui Bapenda Paser untuk menyiapkan strategis peningkatan penerimaan pajak daerah,” jelas Basri.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Pemkab Paser yaitu dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.

“Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah, menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur,” ulasnya.

Begitupun, terkait kurangnya petugas penilaian pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian (*Appraisal*) terhadap objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser.

DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah kabupaten Paser untuk melakukan Kerja sama dengan kantor wilayah direktorat jenderal pajak,” ungkapnya.

Mengenai penerimaan pajak *reklame*, mencapai sekitar Rp1,026 miliar dan sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam hal ini, sambung Basri DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi terkait capaian kinerja tersebut.

“Cuma kami menganggap, potensi penerimaan pajak *reklame* masih belum cukup besar sehingga kami menekankan Pemkab Paser untuk melaksanakan strategi yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan terkait pajak *reklame*,” urai Basri.

dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, sambung Basri dapat memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasinya. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga adanya keseimbangan.

“Untuk kedepannya dalam penyusunan dokumen LKPj, kami minta agar Pemkab memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar-benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya,” tutup Basri. **(Advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Paser Berikan 9 Rekomendasi, 23/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup LKPj meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.